

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Jose Eldad Pratama Zebua

NPP. 31.0364

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah  
Fakultas Manajemen Pemerintahan  
Email: joseeldadpratamazebua@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Suropto, MSi

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The background of the problem is that the procurement of government goods and services has a high risk of corruption and administrative invalidity. **Objective:** This study aims to determine how the effect of the implementation of the E-Procurement system policy in the Bandung Regency Regional Government of West Java Province, as well as to analyze efforts to overcome the obstacles that occur. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative, where data collected from interviews, observations, and documentation are analyzed through data triangulation to address the research problems. **Results:** This research was conducted using descriptive qualitative research methods where this research will describe the original situation during the research, through data collection methods and then described in an analysis and deductive approach to be able to answer the formulation of existing problems. Then the data collection technique in this study uses a triangulation technique consisting of observation, interviews, and documentation. **Conclusion:** The findings in this study are that the implementation of E-procurement policies in local governments has been running quite well. There are several factors that determine the success or failure of an implementation process, namely the quality of the policy itself, the adequacy of policy inputs, the accuracy of the instruments used to achieve policy objectives, the capacity of implementers, the characteristics and support of target groups, geographic, social, economic and political environmental conditions.

**Keywords:** Policy Implementation, E-Procurement.

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP):** Memiliki latar belakang permasalahan yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya korupsi dan ketidakvalidan administrasi. **Tujuan:** Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kebijakan sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, serta untuk menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode:** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan yang asli selama penelitian, melalui cara pengumpulan data kemudian dideskripsikan dalam sebuah analisis dan pendekatan deduktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengembangan pegawai di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota Bandung sudah berjalan cukup baik dalam dimensi pelatihan, namun dalam dimensi Pendidikan formal masih perlu ditingkatkan dalam aspek pengetahuan. **Kesimpulan:** Temuan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan *E-procurement* di Pemerintah daerah sudah berjalan cukup baik. Ada beberapa faktor menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses Implementasi, yaitu kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, *E-Procurement*.

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa merupakan usaha dari pihak pengguna untuk memperoleh atau mendapatkan barang/jasa yang mereka inginkan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan metode dan prosedur khusus untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan syarat lainnya. Juliani & Sholihin (2014) dalam jurnalnya menyatakan bahwa "Tujuan utama pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk mencari sumber pasokan barang/jasa saat organisasi memerlukan dengan harga terendah dan kualitas yang memenuhi standar".

Korupsi menurut Cahyani (2022) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa korupsi adalah penggunaan kekuasaan atau posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi pihak lain, seperti perusahaan. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Inggris "corruption" dan bahasa Belanda "corruptie". Istilah ini merujuk pada tindakan atau situasi yang tidak etis, terutama terkait dengan ketidakjujuran dalam urusan keuangan seseorang. Secara umum, korupsi menggambarkan tindakan ilegal yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas hukum, termasuk korporasi.

**Gambar 1.1**  
**Data Kasus Korupsi Nasional Tahun 2004-2023**

TPK Berdasarkan Jenis Perkara  
 Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara  
 □ Statistik □ 17 November 2023 Cetak

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa/Ky	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	54	331
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2			25
Gratifikasi/Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	63	967
Pungutan/Pemerasan			7	2	3				0	1	6	1	1		4	1			1	1	28
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	6	3			57
TPPU									1	7	5	1	3	7	6	5	3	7	5	8	58
Merintangl Proses KPK									2		3			2	3			1		2	13
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>128</b>	<b>1479</b>

TPK Berdasarkan Wilayah  
 Statistik TPK Berdasarkan Wilayah  
 □ Statistik □ 06 Oktober 2023 Cetak

DATA PERKARA TPK BERDASARKAN WILAYAH

NO	PROVINSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	18	26	18	16	29	38	32	55	29	22	20	31	461
2	Jawa		3	5	3	8	7	11	14	10	29	20	6	44	46	86	28	19	23	48	27	437
3	Sumatera	1	1		5	5	4	6	2	15	12	8	24	20	21	56	40	29	43	19	7	318
4	Sulawesi				1	1		1	2	5	1	2	2	2	3	5	3	7	8	8	2	53
5	Maluku													1	5			4	5	2		17
6	Kalimantan			7	3	2									9	10	16	6	5	11	2	71
7	Bali										2	2			1				3			8
8	Papua					1	2	1			4	7		2	3	2	1		9	6		38
9	Kepulauan Nusa Tenggara			1		2				2	4		3		2	3					8	25
10	Malaysia		3		3									1								7
11	Singapura					2		1														3
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>199</b>	<b>147</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>1438</b>

Sumber : <https://www.kpk.go.id/id>

Pengadaan barang/jasa mesti berlangsung dengan adil dan transparan yang nantinya akan berdampak besar bagi masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, diharapkan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) bisa dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas tanpa diskriminasi.

Sartika & Yuliani (2013) dalam jurnalnya menjelaskan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan transparansi publik adalah melalui kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government. Salah satu aspek dari pengembangan e-government ini adalah layanan publik untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah melalui sistem pelelangan elektronik, atau yang dikenal sebagai e-procurement. Sistem ini menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk pelelangan umum yang diadakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Implementasi E-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-procurement. Analisis terhadap proses bisnis menunjukkan bahwa E-Procurement bisa meningkatkan kejelasan, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pengembangan e-government merupakan salah satu upaya dari pemerintah sebagai suatu strategi dan kebijakan untuk menciptakan transparansi publik. Hidayat (2020:3) dalam bukunya menyatakan “Salah satu aspek dari pengembangan e-government adalah penyediaan layanan publik dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah melalui sistem pelelangan elektronik yang disebut e-procurement. E-Procurement menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk pelelangan umum yang diatur oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).”

Berdasarkan masalah dan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Implementasi Kebijakan Sistem E-Procurement Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan E-Procurement bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas serta transparansi pengadaan barang/jasa serta menghilangkan intervensi bagi masyarakat dan mempermudah layanan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kejanggalan yaitu pada pelaksanaan lelang tender pengadaan interior untuk ruang kerja bupati dan wakil bupati dengan jumlah anggaran yang dinilai cukup besar pada 2022 yang sempat diulang karena ketidaksesuaian dengan syarat kualifikasi. “Dari jumlah tender sebanyak 91 peserta terdapat salah satu badan usaha sebagai pemenang yang beralamat di Kompleks Pasir Madur Indah, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Namun, setelah diselidiki ternyata alamat tersebut merupakan rumah kosong yang telah disita oleh pihak bank” (Ripaldi.2022. Liputan6.com, 9 Agustus 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan E-Procurement untuk sistem lelang tender memungkinkan terjadinya kesalahan dokumen meskipun lolos kualifikasi.

**Gambar 1.2**  
**Tender Interior Ruang Kerja Bupati Bandung 2022**

Informasi Tender							
Kode Tender	7252093						
Nama Tender	Interior Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati						
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana				
	35787989	Interior Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati	APBD				
Tanggal Pembuatan	21 Juli 2022						
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai						
K/L/PP/Instansi Lainnya	Kab. Bandung						
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi						
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur						
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction						
Tahun Anggaran	APBD 2022						
Nilai Pagu Paket	Rp. 2.225.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 2.224.823.393,00				
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsom dan Harga Satuan						
Lokasi Pekerjaan	• Kabupaten Bandung - Bandung (Kab.)						
Kualifikasi Usaha	Kecil						
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <table border="1"> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SILUK</td> <td>Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil yang masih berlaku atau Perjinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB 41019 Konstruksi Gedung Lainnya</td> </tr> </table> <p>2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</p>			Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	SILUK	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil yang masih berlaku atau Perjinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB 41019 Konstruksi Gedung Lainnya
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi						
SILUK	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil yang masih berlaku atau Perjinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB 41019 Konstruksi Gedung Lainnya						

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan	
1	Pengumuman Pascakualifikasi	1 Agustus 2022 15:45	6 Agustus 2022 15:45	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	1 Agustus 2022 15:46	8 Agustus 2022 13:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	4 Agustus 2022 10:00	4 Agustus 2022 11:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Agustus 2022 13:00	8 Agustus 2022 13:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	8 Agustus 2022 13:01	8 Agustus 2022 23:59	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	8 Agustus 2022 13:02	16 Agustus 2022 17:00	1 kali perubahan
7	Pembukaan Klaim	15 Agustus 2022 14:00	16 Agustus 2022 16:15	2 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	16 Agustus 2022 16:16	16 Agustus 2022 18:01	2 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	16 Agustus 2022 18:02	16 Agustus 2022 23:59	1 kali perubahan
10	Masa Sanggah	17 Agustus 2022 09:00	22 Agustus 2022 09:00	1 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22 Agustus 2022 09:01	23 Agustus 2022 16:00	Tidak Ada
12	Penandatanganan Kontrak	24 Agustus 2022 09:00	7 September 2022 16:00	Tidak Ada

Sumber : <https://lpse.bandungkab.go.id>

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Bandung dinilai transparan dan bebas dari korupsi. Meski demikian, ada kendala dalam pelaksanaannya terkait pemeliharaan atau perbaikan server pusat yang diperlukan hampir setiap bulannya.

**Gambar 1.3**  
**Pengumuman Maintenance Server LPSE**

Tanggal	Judul Pengumuman
15 September 2023 14:02	PERMOHONAN MAAF
2 Agustus 2023 08:50	PERMOHONAN MAAF
3 Juli 2023 08:00	PERMOHONAN MAAF
11 April 2022 08:02	Himbauan Perubahan Password
28 Maret 2022 10:25	PERMOHONAN MAAF
2 Maret 2022 19:45	PERMOHONAN MAAF
5 Juli 2021 13:50	Pembentahan Verifikasi Petaku Usaha LPSE Kabupaten Bandung
5 September 2020 10:08	maintenance server LPSE
31 Agustus 2020 10:39	PERMOHONAN MAAF
1 April 2020 09:16	PERUBAHAN PROSEDUR REGISTRASI DAN VERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA
30 Januari 2020 14:03	Pemeliharaan Server Aplikasi Katalog Elektronik
15 Januari 2020 08:48	Pemeliharaan Server Aplikasi Katalog Elektronik
6 Agustus 2019 10:22	PERMOHONAN MAAF
6 Agustus 2019 18:48	PERMOHONAN MAAF
18 Juli 2019 09:34	Klarifikasi Jadwal Tender
14 Juni 2019 10:55	PERMOHONAN MAAF
28 Maret 2019 10:50	PERMOHONAN MAAF
28 Februari 2019 16:47	Pembentahan tanggapan lead tolak SPSE versi 4.3 @Agenda versi 5.1.2
15 Desember 2018 11:03	PERMOHONAN MAAF
7 November 2018 07:42	PERMOHONAN MAAF
9 Agustus 2018 13:10	PERMOHONAN MAAF
15 Mei 2018 10:59	PERMOHONAN MAAF
14 Mei 2018 20:13	PERMOHONAN MAAF
20 Maret 2018 18:39	PERMOHONAN MAAF
28 Februari 2018 10:30	PERMOHONAN MAAF

Sumber : <https://lpse.bandungkab.go.id>

Pelaksanaan sistem E-Procurement di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangani oleh Pelaksana Tugas atau Pegawai di Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Tujuannya adalah untuk mendukung Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan pemantauan, serta evaluasi.

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Bagian Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Bandung**

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD RIDWAN, ST., MT	Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa

NO	NAMA	JABATAN
2	ANDRIAN FIRMANSYAH, S.T	Bagian Pengadaan Barang/jasa
3	M. Budi Surya Nugraha, S.Sos	Pembinaan Dan Advokasi PBJ
4		Pengelola LPSE
5	Roni Darukutni, S.Sos	Pranata Barang/jasa
6	H. Deni Setiawan, S.Sos	Pranata Barang/jasa
7	Sukirman, S.Sos	Pranata Barang/jasa
8	Sopandi, ST	Pranata Barang/jasa
9	A. Sutarman	Pranata Barang/jasa
10	Sri Mulyani	Pranata Barang/jasa

Sumber: <https://ppid.bandungkab.go.id/>, diolah oleh penulis 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 untuk jabatan Pegawai Bagian Pengadaan Barang/jasa mengalami satu kekosongan, yaitu pada jabatan Pengelola LPSE.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian mengenai pengadaan barang dan jasa serta sistem *E-Procurement* telah dilakukan di berbagai lembaga dan institusi. Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian tersebut:

Penelitian pertama oleh Utari Swadesi (2017) berjudul "Efektivitas Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (E Procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru" menggunakan metode kualitatif. Fokusnya adalah efektivitas Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (E Procurement) di LPSE. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemerintah dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik. Hasil penelitian tersebut Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik di LPSE Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi positif terhadap proses pengadaan yang transparan dan sehat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengadaan barang/jasa elektronik di LPSE Kota Pekanbaru meliputi Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Kesulitan Teknis, dan Faktor Sumber Pendanaan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Salma pada tahun 2018 berjudul "Peranan E-Procurement Dalam Pencegahan Fraud Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan" menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran E-Procurement dalam mencegah fraud sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik. Hasil penelitian tersebut Pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Selatan belum efisien karena masih terdapat kecurangan antara penyedia jasa dan panitia pengadaan.

Penelitian ketiga oleh Evinnaldy (2016) yang berjudul "Pelaksanaan E-Government Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014" dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana Layanan Pengadaan Secara Elektronik mendukung E-Government. Hasil penelitian tersebut Variabel efisiensi dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap good governance, namun variabel efektif, daya saing, dan tanggung jawab tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap good governance.

Penelitian yang keempat oleh Muhammad Solihin (2020) berjudul Efisiensi Implementasi E-Procurement di Kota Yogyakarta tahun 2008-2012 dengan metode penelitian yang digunakan ialah

metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut Implementasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan waktu, serta memfasilitasi persaingan yang adil dan objektif antara penyedia.

Penelitian yang kelima oleh Dwi Novitarini (2020) berjudul Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement di Kota Salatiga dengan metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Hasil penelitian tersebut pelaksanaan pengadaan barang/jasa via E-Procurement sudah mengikuti prinsip-prinsip pengadaan tersebut. Namun, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti gangguan server karena pemadaman listrik, perbaikan sistem dan frekuensi penggunaan sistem, serta kekurangan tenaga kerja yang ahli.

Penelitian keenam oleh Dewi Yuni Lestari (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. Hasil dari penelitian ini masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pangandaran beberapa aspek yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Penelitian ketujuh oleh Michael Nelsen Lumintang (2020) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep pengembangan sumber daya manusia sudah baik, sosialisasi yang kurang menyebabkan perlunya strategi manajemen yang lebih baik.

Penelitian yang kedelapan oleh Arifin Kaimal, dkk. (2023) yang berjudul Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini berfokus pada E-Katalog yang merupakan salah satu bagian dari E-Procurement dengan metode kuantitatif dengan 50 sampel. Hasil analisis tersebut menunjukkan Penerapan e-Katalog secara langsung berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Efektifitas Penyedia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian kesembilan oleh Akbar Fajri, dkk. (2023) yang berjudul Pengaruh E-Procurement dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini berfokus pada pengaruh e-procurement dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel dan whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Penelitian kesepuluh oleh Andriani (2023) yang berjudul Analisis Kepuasan Pemasok terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Penelitian ini berfokus pada pihak ketiga sebagai penyedia terhadap RSUP sebagai pihak yang membuka pengadaan. metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dengan hasil menunjukkan bahwa, terdapat hubungan signifikan antara kualitas layanan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang memiliki fokus untuk membahas bagaimana administrasi manajemen dari *e-Procurement* ini melalui implementasi kebijakan yang terus berubah-ubah, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Erwan Agus Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) yang menyatakan bahwa ada

beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni Kualitas kebijakan itu sendiri; Kecukupan input kebijakan; Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan; Kapasitas implementor; Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran; Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik.

## 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pisau analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Erwan Agus Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85). Dengan menggunakan teori Implementasi dari Erwan Agus Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari 6 (enam) aspek yaitu Kualitas kebijakan itu sendiri, Kecukupan input kebijakan, Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, dan Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Enam aspek tersebut merupakan faktor-faktor yang paling relevan untuk digunakan dalam implementasi kebijakan di Indonesia.

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena fokus utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Menurut Simangunsong (2017:215) mengemukakan bahwa “dalam metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan disempurnakan dengan triangulasi masing-masing teknik dapat digunakan tersendiri”.

Teknik analisis data melibatkan transformasi data menjadi informasi baru yang memiliki nilai signifikan dalam menyelesaikan masalah tertentu, terutama dalam konteks penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan metode pengumpulan data kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa deskripsi dan berfokus pada pemahaman fenomena sosial serta perilaku manusia. Hasil analisis menggunakan teknik ini akan memberikan penjelasan, memperlihatkan penyebab, dan menyoroti aspek-aspek yang mendasari topik yang dibahas. Menurut Simangunsong (2017:226) mengemukakan bahwa “Analisis berlangsung terus-menerus hingga selesai, sehingga data sudah melalui beberapa tahapan sampai mencapai titik jenuh”.

Dalam metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan disempurnakan dengan triangulasi masing-masing teknik dapat digunakan tersendiri. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih informan setelah mengetahui informasi yang diinginkan. Kemudian, peneliti memilih informan yang diyakini mampu memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan kualitas atau kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini peneliti menjadikan aparat Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Kabupaten Bandung sebagai informan karena dianggap mengerti

tentang permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Procurement Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung

Penulis menganalisis implementasi kebijakan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menggunakan pendapat dari Erwan Agus Purwanto dan Sulistyastuti dalam bukunya, dimana dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu Kualitas kebijakan itu sendiri, Kecukupan input kebijakan, Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, dan Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

##### 3.1. Kualitas Kebijakan

Implementasi kebijakan sistem e-Procurement di Kabupaten Bandung memiliki kejelasan tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dari observasi yang dilakukan penulis, pada pelaksanaannya dinas atau OPD yang terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan peran dan tupoksinya dengan PA yang berasal dari internal OPD tersebut.

**Gambar 1.**  
**Data SPM Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat**



*Sumber: Diolah oleh penulis 2024*

Pada **Gambar 1** dapat dilihat dari gambar diatas bahwa Kabupaten Bandung menempati posisi pertama untuk capaian input pelaporan di lingkungan Provinsi Jawa Barat dengan nilai input sebesar 94,9%. Hal ini menandakan kejelasan implementor sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan dapat dinilai baik dan memuaskan.

##### 3.2. Kecukupan Input Kebijakan

Kecukupan input kebijakan di dalamnya terdapat sumber daya manusia, sumber daya financial, teknologi, infrastruktur, dan dukungan politik yang dibutuhkan untuk mengImplementasikan kebijakan dengan optimal.

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung**

No	Uraian	Anggaran
	<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>	
<b>I</b>	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa	<b>1,149,203,800</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa	<b>280,704,500.00</b>
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( Lpse )	<b>615,565,000.00</b>
3	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa	<b>252,934,300.00</b>
	<b>Total</b>	<b>2,298,407,600.00</b>

*Sumber: LPSE Kabupaten Bandung 2023*

Berdasarkan data dari tabel diatas menggambarkan bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mendapat dukungan anggaran untuk mendukung proses implementasi kebijakan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk prose pengadaan barang dan jasa pemerintah akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan publik sebagai objek sasaran pemerintah seperti contohnya infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan dukungan anggaran yang cukup, sistem E-Procurement dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan efisien. Hal ini mendukung optimisasi penggunaan anggaran publik dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik di lingkungan pemerintah daerah. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang da jasa sudah transparan dan dapat diakses oleh publik melalui situs <https://lpse.bandungkab.go.id>.

### **3.3. Ketepatan Instrumen**

Ketepatan instrumen yang dimaksud adalah metode dan alat yang digunakan untuk mengImplementasikan kebijakan sistem E-Procurement agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

**Gambar 2.**  
**Hardware Server dan Kelengkapan Fasilitas Kantor**



*Sumber: Diolah oleh penulis 2024*

Instrumen yang tepat dalam kebijakan penyelenggaraan sistem E-Procurement dapat membuat kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Pemilihan instrumen merupakan hal yang penting untuk terselenggaranya suatu kebijakan dan juga instrumen yang digunakan harus memperhatikan konteks, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Instrumen untuk mendukung sistem E-Procurement ini kita menggunakan perangkat server sebagai hardware nya dan juga server dan domain SPSE yang sudah disediakan dari pusat. Instrumen yang ada sudah tepat namun untuk SPSE nya sendiri memang dalam beberapa saat dalam satu bulan mengalami maintenance. Walaupun dapat menghambat proses seleksi e-tender atau e-purchasing, maintenance ini terjadi karena pembaharuan keamanan server untuk mencegah peretasan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

### **3.4. Kapasitas Implementor**

Kapasitas implementor mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan teknis, keterampilan manajemen, dukungan anggaran, serta komitmen untuk menerapkan dan memperbarui kebijakan sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi.

**Gambar 3.**  
**Rapat Evaluasi Kinerja Internal**



*Sumber: Diolah oleh penulis 2024*

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis mendapati bahwa kapasitas implementor diperdayakan dengan baik dengan menjalankan hirarki yang efisien. Sebagai contoh pada gambar diatas terdapat sebuah rapat kecil yang membahas evaluasi kinerja pencapaian setiap satu bulan yang menerapkan komunikasi terbuka.

### **3.5. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran**

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis. Sistem seleksi melalui e-Procurement hingga saat ini masih perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan karena informasi yang disebarluaskan melalui website SPSE belum berdampak optimal. Gambar diatas merupakan kegiatan sosialisasi bagi calon peserta seleksi tender melalui e-Procurement agar setiap pihak dapat mengetahui dan memahami prosedur yang berlaku dan sistem ini telah berjalan sejak 2022 lalu.

Kelompok sasaran Implementasi kebijakan sistem e-Procurement, penyedia yang kompeten, berbobot, dan jujur menjadi fokus utama, seiring dengan upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa publik. Namun demikian, tidak terlupakan pula peran

penting masyarakat umum sebagai penerima manfaat akhir dari kebijakan tersebut, dengan harapan bahwa E-Procurement akan membawa peningkatan dalam transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

### 3.6. Kondisi Lingkungan Geografi, Sosial, Ekonomi, dan Politik

Implementasi kebijakan sistem E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara sosial, penerimaan dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru perlu diperhatikan agar proses implementasi dapat berjalan lancar. Politik lokal juga memainkan peran penting dalam menentukan dukungan dan keberlanjutan kebijakan ini. Dari segi ekonomi, transparansi dalam proses E-Procurement dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Sementara dari segi budaya, pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan khusus komunitas setempat akan memfasilitasi adopsi teknologi ini secara holistik dan berkelanjutan.

**Gambar 4.**  
**Revitalisasi Pasar Banjaran**



*Sumber: Diolah oleh penulis 2024*

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, kondisi lingkungan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sistem e-Procurement ini. Gambar diatas merupakan pengadaan jasa revitalisasi Pasar Banjaran yang menuai pro-kontra dari sosial masyarakat. Bahkan, revitalisasi ini sempat menjadi topik panas karena Bupati Bandung dilaporkan dugaan melakukan korupsi atas pengadaan ini. Namun dugaan tersebut terbukti salah dan terdapat isu bahwa laporan tersebut merupakan kondisi politik yang mendekati pemilihan kepala daerah.

### 3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menganalisis dan membahas mengenai bagaimana hasil implementasi kebijakan dituangkan dalam sistem administrasi. Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Utari Swadesi (2017) yang memiliki fokus penelitian untuk menghitung dan menganalisis sejauh mana efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik.

Layaknya program lainnya, sistem manajemen pemerintahan yang mulai merambat ke arah digitalisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta menekan kegagalan dalam pelaksanaannya. Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salma (2018) yang menganalisis peran *e-Procurement* dalam mencegah kecurangan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik.

Adanya kebijakan sistem *e-Procurement* ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik dan mencegah kecurangan dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah layaknya penelitian Muhammad Solihin (2020) dimana Implementasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan waktu, serta memfasilitasi persaingan yang adil dan objektif antara penyedia.

#### **4.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat implementasi kebijakan sistem *e-Procurement*. Dibalik kebijakan yang mengatur mengenai sistem dan prosedur, pada kenyataannya kebijakan ini dapat dijadikan alat politik seperti yang ditemukan oleh penulis. Bupati Kabupaten Bandung sempat dilaporkan ke KPK dengan dugaan tindak korupsi untuk pengadaan revitalisasi pasar banjaran dan hasilnya tidak terbukti. Melalui banyak berita, salah satunya dalam laman situs detikcom gugatan tersebut diisukan bersangkut paut dengan politik pemilihan kepala daerah karena beliau berencana untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati bandung di periode selanjutnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya konsistensi dan kesesuaian implementor dalam menerapkan kebijakan dengan amanah. Faktor-faktor tersebut meliputi komitmen dan visi bersama, di mana pemimpin dan staf terlibat harus memiliki komitmen yang kuat terhadap visi dan prinsip yang sama, yaitu keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang stabil sangat penting untuk mendukung operasional sistem e-procurement. Guna meningkatkan efektifitas implementasi *e-Procurement* perlu dilakukan upaya-upaya seperti pelatihan pegawai, komunikasi efektif tentang manfaat sistem, pengembangan kebijakan internal yang mendukung, serta pemantauan dan evaluasi berkala menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan dukungan untuk menggunakan sistem E-Procurement dengan efektif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Bandung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Hidayat, Candra Nur (2020). *Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik*, Pamulang Law Review

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.

### B. JURNAL ILMIAH

Cahyani, E. (2022). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 3(2)  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/15527>

Faisal dkk. (2017). *Analisis Sistem Pengadaan Barang/jasa (Penunjang Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2)  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18613>

Juliani, D., Sholihin, M. (2014). *Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 11(2)  
<https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol11/iss2/4/>

Purwanto dkk. (2017). *Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Kota Bogor*. Jurnal Manajemen Indonesia, 17(3)  
<https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1153>

Sartika, D., Yuliani, F. (2013). *Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/jasa*. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2) <https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/2191>

### C. SKRIPSI

Evinnaldy. 2016. *Pelaksanaan E-Government Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014*. Skripsi. STIE Dewantara. Kepulauan Riau

Novitarini, Dwi. 2020. *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement di LPSE Kota Salatiga*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salatiga

Salma. 2018. *Peranan E-Procurement Dalam Pencegahan Fraud Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. STIE Dewantara. Sulawesi Selatan

Solihin, Muhammad. 2020. *Efisiensi Implementasi E-Procurement di Kota Yogyakarta tahun 2008-2012*. Skripsi. Universitas Kepulauan Riau. Yogyakarta

Swadesi, Utari. 2017. *Efektivitas Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (E Procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru

Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran*. Skripsi. Universitas Unigal. Pangandaran

Lumintang, M. N., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. 2021. *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara*. Skripsi. Universitas SamRatulangi. Minahasa

- Arifin, K., Daga, R., & Anshar, M. A. 2023. Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Sulawesi Selatan
- Hasanah, A. N., Maria, M., & Oktarida, A. 2023. Pengaruh E-Procurement dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Skripsi. Banyuasin
- Andriani, D., Arso, S. P., & Raharjo, M. 2023. Analisis Kepuasan Pemasok terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Skripsi. STKIM. Semarang

